



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Subbab ini akan menjelaskan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian media cetak yang terkait peran politik pers. Sejumlah penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian mengenai peran politik pers telah cukup banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Duncan McCargo dengan judul “Media As an Agent of Stability? Suharto’s Indonesia” dalam bukunya yang berjudul *Media and Politics in Pasific Asia*. McCargo adalah seorang profesor politik University of Leeds yang memusatkan penelitian pada politik pers di kawasan Asia Tenggara. McCargo menghasilkan total ratusan hasil penelitian lain yang dimuat menjadi berbagai buku dan jurnal ilmiah⁹.

Pada penelitian mengenai peran politik pers era Soeharto selama periode 1994-1998, McCargo menggunakan metode penelitian wawancara mendalam (*depth interview*) dengan sejumlah sumber utama, di antaranya analis media Daniel Dhakidae, pemimpin redaksi Majalah Tempo Goenawan Mohamad, pemimpin redaksi majalah Gatra Herry Komar.

⁹ “Professor Duncan McCargo Publication,”
<http://www.polis.leeds.ac.uk/about/staff/mccargo/publications.php> (akses 5 Oktober 2012)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran politik Majalah Tempo dan menggambarkan keadaan pers di Indonesia saat pemerintahan Soeharto. Selain itu, McCargo membuktikan bahwa Majalah Tempo memainkan dua peran politik secara simultan pada saat pemerintahan Soeharto. Dari sisi tersebut, Majalah Tempo disebutkan sebagai publikasi polivalen yang berarti memiliki lebih dari satu peran. Penelitian tersebut menuliskan peran politik Majalah Tempo sebagai agen stabilitas dan di sisi lain juga turut memerankan peran sebagai agen pengawasan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terutama terletak pada topik, pendekatan, dan metode penelitian. Jika McCargo memilih peran politik pers Majalah Tempo sebagai topik penelitiannya, maka peneliti memilih kasus dugaan korupsi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat pada Surat Kabar *Kompas*. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi, sedangkan McCargo menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam (*depth interview*) sebagai satu metode pengumpulan data.

Penelitian mengenai peran politik pers juga dilakukan oleh Ambang Priyonggo, mahasiswa pascasarjana jurusan International Journalism, Fakultas Journalism and Mass Communication, Westminster University, pada tahun 2003 dalam disertasinya yang berjudul "Press As an Actor: An Examination On The Political Roles of Press in 'New' Democratic Indonesia" (A Case

Study of *Kompas Daily*). Penelitian ini menggunakan kombinasi riset analisis isi kuantitatif dan *depth interview* kualitatif.

Pada penelitian tersebut, Priyonggo membagi tiga isu politik krusial pada masa demokrasi Indonesia pada 1999-2002 (pasca rezim Soeharto), yaitu (1) saat perdebatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden wanita pertama, (2) proses pemecatan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2001, dan (3) finalisasi amandemen konstitusi 2002.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana ketiga peran politik pers digambarkan untuk mempengaruhi peran politik *Kompas* pada masa transisi 1999-2002, peran apa yang dimainkan *Kompas* di bawah kondisi politik tersebut, apakah *Kompas* menjadi aktor yang memainkan dua peran bersamaan, serta seberapa efektif peran politik tersebut selama masa transisi demokrasi negara.

Hal-hal ini dikaji antara lain hubungan harian umum *Kompas* ditinjau dari fungsi media dalam konsep sebagai aktor atau institusi politik yang dibagi menjadi tiga peran, yaitu sebagai agen stabilitas, agen pengawasan, dan agen perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan harian umum *Kompas* berperan sebagai agen perubahan pada isu kandidat presiden wanita, *Kompas* menampilkan *agenda setting* yang sangat positif dengan memberitakan banyak artikel kontra terhadap bias gender dan mengutip banyak sumber utama yang berpandangan kontra juga terhadap isu tersebut.

Selanjutnya pada isu proses pemecatan Gus Dur, *Kompas* memiliki dua peran (*bivalent*) secara bersamaan yaitu sebagai agen pengawasan dan agen stabilitas dalam menuliskan berita politik mengenai proses pemecatan Presiden Gus Dur. *Kompas* berperan sebagai agen pengawasan dengan menyediakan pengecekan dan keseimbangan pada tata pemerintahan baru dan dalam satu sisi berperan sebagai agen stabilitas dengan mengakomodasi berbagai pandangan alternatif dalam membantu penyesuaian ide atas pemeliharaan tata pemerintahan sosial dan politik.

Pada isu amandemen konstitusi dengan adanya perubahan terutama pada beberapa ayat konstitusi UUD 1945 mengenai pembatasan masa jabatan presiden, *Kompas* menjalankan peran sebagai agen pengawasan yang berusaha melakukan pemantauan melalui *checking and balancing* elite antara legislatif dan eksekutif.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terutama terletak pada topik penelitian dan dimensi waktu penelitian. Jika Priyonggo memilih tiga isu politik krusial pada masa demokrasi Indonesia pada 1999-2002 sebagai topik, maka peneliti memilih kasus dugaan korupsi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Priyonggo pun melakukan penelitian dalam periode waktu sebelum 2003. Selain itu, peneliti hanya melakukan metode penelitian analisis isi kuantitatif, sedangkan Priyonggo menggunakan *mix method* yang merupakan gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif.

2.2 Kerangka Teori

Dalam lingkup komunikasi massa, telah banyak teori dan konsep mengenai aspek-aspek komunikasi yang ditemukan. Berikut teori dan konsep yang digunakan peneliti dalam kajian peran politik pers.

2.2.1 Teori Agenda Setting

Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dari *School of Journalism, Univeristy of North Carolina* lewat tulisannya *The Agenda Setting Function of the Mass Media*. Dari hasil riset itu McCombs dan Shaws menemukan adanya korelasi yang signifikan antara isu yang diangkat oleh media pemberitaan dengan isu yang dianggap penting oleh pemilih.

Dearing dan Rogers dikutip oleh McQuail menyebutkan bahwa porsi sebuah isu dalam agenda media memiliki peran penting dalam menentukan isu yang dianggap sebagai agenda publik. McQuail juga menekankan bahwa *agenda setting* memiliki kontribusi dalam pembentukan persepsi politik dan realitas sosial khalayak (McQuail, 2005:513).

Dalam penelitian McCombs dan Shaw, teori ini mengakui bahwa media pemberitaan memberi pengaruh terhadap khalayak dalam pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, citra, maupun penampilan

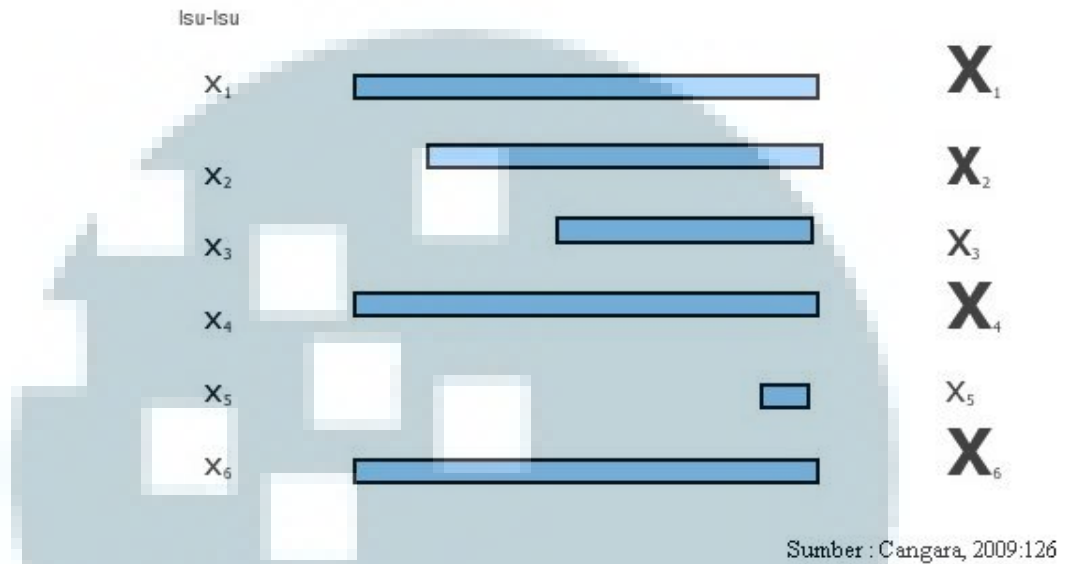
kandidat presiden. Meningkatnya penonjolan atas isu yang berbeda bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap opini publik. Pembentukan opini publik dalam komunikasi politik sangat ditentukan oleh peranan media politik, terutama media massa. Pers, radio, film, dan televisi, selain fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga membentuk citra politik dan opini publik yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik (Arifin, 2011:189).

Dalam konteks politik, partai-partai dan para aktor politik akan berusaha mempengaruhi agenda media untuk mengarahkan pendapat umum dalam pembentukan opini publik.

“The core idea is that the news media indicate to the public what the main issues of the day are and this is reflected in what the public perceives as the main issues... The evidence collected at that time and much since consists of data showing a correspondence between the order of importance given in the media to ‘issues’ and the order of significance attached to the same issues by politician and public... This is an essential part of advocacy and attempts at influencing public opinion.” (McQuail, 2005:512)

Media pemberitaan tidak saja tergantung pada berita kejadian (*news event*), tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menggiring orang melalui agenda-agenda yang bisa membuka pikiran mereka. McCombs dikutip oleh Cangara (2009:125) mengatakan: “*The mass media may not be successful in telling people what to think, but the media are stunningly successful in telling their audience what to think about.*”

Gambar 2.1
Agenda Setting



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah isu yang dianggap penting di mana media memberi perhatian yang besar akan menimbulkan perhatian yang besar pula bagi khalayak (X1). Sebaliknya jika suatu isu dinilai oleh media kurang menarik, dengan sendirinya isu itu akan kurang menarik bagi khalayak (x5). Di Indonesia, beberapa surat kabar memiliki kelebihan dalam mengetengahkan isu-isu tertentu (agenda media) lewat tajuk rencana (*editorial*), berita utama (*headline*), artikel yang khusus dibuat untuk itu, serta berita-berita hasil wawancara (*talking news*) dari narasumber yang kompeten (Cangara, 2009:125).

“Teori ini menjelaskan bahwa besarnya perhatian media massa terhadap sebuah peristiwa dan isu sangat mempengaruhi perhatian khalayak. Isu yang dianggap penting oleh media massa, juga akan dipandang penting oleh khalayak. Sebaliknya isu yang tidak dianggap penting oleh media, juga tidak akan dianggap penting oleh khalayak.” (Arifin, 2011:164)

Para redaktur media memiliki ketajaman untuk mengangkat isu-isu yang perlu dibicarakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Isu-isu itu tidak hanya muncul dari anggota redaksi sendiri, tapi juga para pengelola media biasanya memiliki kelompok pemikir (narasumber) yang dapat dihubungi setiap saat untuk memberi ulasan. Oleh karena itu, para penerbit biasanya memiliki penulis tajuk atau artikel yang berbeda menurut keahlian masing-masing (Cangara, 2009:125-126).

McCombs dan Shaw yang dikutip Baran menyebutkan bahwa dalam memilih dan menampilkan berita, editor, reporter, dan penyiar memainkan bagian penting dalam membentuk realitas politik. Pembaca tidak hanya mengenali isu yang diberikan, tapi juga mengenali seberapa penting isu itu terkait banyaknya jumlah informasi yang ditampilkan dalam suatu berita dan di mana posisinya. Media massa dapat dengan baik menentukan isu penting, di mana media dapat menentukan 'agenda' kampanye (Baran, 2012:294).

Lewat fungsi *agenda setting* inilah pers lebih berperan sebagai ikut memberi arah, ikut mempengaruhi apa yang sebaiknya menjadi acara, program, perhatian, isu, dan prioritas masyarakat, elite politik dan pemerintah. Setiap hari atau secara periodik sesuai dengan frekuensi penerbitannya, pers selalu bertanya apa yang diberitakan, apa yang akan diliput, dan apa yang diangkat sebagai bahan komentar. Ada rencana dan ada agenda (Oetama, 2001:98).

Selain itu, dalam sistem pemerintahan demokrasi khususnya seperti Indonesia setelah era Orde Baru, media massa diharapkan bisa berperan salah satunya untuk melakukan *agenda setting* dengan mengangkat isu-isu kunci yang perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluar oleh masyarakat (Cangara, 2009:137).

2.2.2 Politik Media

Media pada dasarnya memiliki karakter yang bermacam-macam dan jamak, terlihat dari kenyataan bahwa media cetak sering meliput tentang isu-isu politik. Seiring dengan kekuasaan negara yang semakin melemah di seluruh dunia, sensor dari negara menjadi semakin lemah pula. Upaya untuk mempengaruhi muatan dan nada dari publikasi pemberitaan menjadi tidak selalu berkaitan dengan negara, tapi oleh politisi oposisi, petinggi militer, pihak publik, pelobi, perusahaan, dan kelompok nonpemerintah (Aminah, 2006:3).

Dalam tataran ideal, kita tentu berharap media menjadi salah satu aktor yang turut menjaga dan mengembangkan demokrasi. Ini artinya membutuhkan peran aktif media dalam ranah politik. Pengaturan agenda media pun turut mempengaruhi politik media. Politik media terutama jelas terlihat di mana media sebenarnya saling berbagi dasar yang sama seperti tiga cabang konstitusi (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang sebagian independen dan sebagai dependen dari institusi lainnya. Artinya,

organisasi-organisasi media saling bergantung, tapi juga sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri (Cook, 1998:86). Politik media juga sangat digambarkan ketika media memiliki kuasa untuk menentukan siapa narasumber yang otoritatif, apa nilai politis yang ada, dan alokasi seperti apa yang layak diberikan (ibid:72). Selain itu, Cook (ibid:75) juga menyebutkan bahwa politik media terlihat dari adanya otonomi jurnalis dan organisasi media dalam memutuskan kutipan narasumber mana yang dijadikan paragraf. Media juga dapat menentukan siapa narasumber yang seharusnya berbicara atas peristiwa apa dan dalam situasi yang seperti apa (ibid:87).

Hal yang menarik selama ini, jika mengaitkan peran media dalam politik, kecenderungannya akan jatuh pada komunikasi politik yang justru “membuat pasif” media (Priyonggo, 2012:51).

Dalam tataran penelitian ini, media pemberitaan dilihat sebagai suatu aktor politik yang berperan sebagai agen stabilitas, agen pengawasan, atau agen perubahan. Namun, konsep tersebut seringkali salah dipersepsikan sebagai komunikasi politik yang memandang bahwa media pemberitaan bersifat pasif sebagai corong politik. Pernyataan tersebut juga disebutkan oleh Erik Neveu dan Raymond Khun dalam subbab *Putting political journalism at the heart of the political communication process* (Neveu & Khun, 2003:20).

Neveu dan Khun melihat tendensi fokus konsep komunikasi politik pada tiga hal berikut:

1. Penekanan pada profesionalisasi komunikasi oleh aktor politik—baik pada tataran *skill* individual dan strategi organisasi.
2. Penekanan pada gabungan daya tarik dan kebencian pada peran para konsultan komunikasi dan *spin doctors*.
3. Penekanan pada peran *demos* (pada tataran politik ideal berinkarnasi sebagai “opini publik” atau pada tataran umum dan komersial disebut sebagai audiens). Dalam konteks ini keduanya dianggap memiliki pengaruh kuat pada jurnalisme.

Selanjutnya, Neveu dan Kuhn menyebutkan bahwa seandainya konsep komunikasi massa menekankan fokus pada media (jurnalis), maka itu dianggap sebagai “peran nyleneh”.

Dalam konteks ini, media pemberitaan ataupun wartawan sering kemudian ditampilkan sebagai entitas atau sosok yang terperangkap dalam dua hal. Di satu sisi media pemberitaan bekerja demi audiens dan menimbang opini publik; sementara di sisi yang lain berada di bawah pengaruh kuat narasumber politik (*political sources*) yang profesional.

“However, they often ascribe to political journalists a strange role in the political communication castlist. From one perspective journalists are frequently presented as trapped between the quest for audiences and the weight of public opinion on the one hand and the powerful influence of professionalised political sources on the other.” (Neveu & Khun, 2003:21)

Untuk itulah Neveu dan Kuhn merasa perlu untuk meninjau ulang konsep peran politik media dalam ranah kecenderungan komunikasi politik seperti ini. Mereka menekankan, media pemberitaan adalah korban tak berdaya dari mesin besar komunikasi (Priyonggo, 2012:52). Gagasan Neveu dan Kuhn tersebut selaras dengan konsep institusionalisasi media. Artinya, untuk mencapai suatu posisi seimbang dengan politisi atau *spin doctors* itu—atau pun ada suatu entitas yang lain, maka media haruslah direpresentasikan sebagai suatu institusi.

2.2.3 Pers sebagai Aktor dan Institusi Politik

Timothy E. Cook mengemukakan argumen yang mengatakan bahwa media adalah aktor politik sekaligus institusi politik dengan haknya sendiri. Cook menggambarkan alasannya dengan pertama-tama menunjukkan gagasan apakah media berita bersifat kelembagaan dan, kedua, menjelaskan apakah media berita juga bersifat politis.

Institusi adalah pola sosial perilaku yang dapat diidentifikasi dalam organisasi yang secara umum dilihat sebagai suatu masyarakat yang membentuk bidang sosial tertentu. Meskipun organisasi tersebut membuat pilihan memungkinkan, kesulitan inheren kognitif yang terhubung dengan praktik tidak bisa diidentifikasi sebagai hal yang paling menguntungkan, dan seluruh peraturan dibentuk oleh mereka sendiri kecuali dan hingga

mereka dengan jelas melukai pencapaian tujuan penting mereka (Cook, 1998:70).

Cook lebih jauh mengemukakan bahwa peraturan dan prosedur suatu institusi dinilai sebagai rutinitas biasa untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan mereka juga menanggung lembur dan memperpanjang waktu kerja. Peraturan dan prosedur itu juga dikenali dalam organisasi yang merupakan institusi sekaligus elemen luar sebagai bagian utama dalam masyarakat dan pemerintahan (Cook, 1998:71).

Keterlibatan media sebagai aktor politik bisa dilihat selain perannya dalam membuat agenda untuk mendapatkan perhatian publik, juga melalui berbagai bentuk publikasi yang dapat dijadikan wacana politik. Misalnya kolom yang ditulis oleh orang tertentu, *feature* tentang figur politisi, karikatur, sementara dalam media siaran selain dalam bentuk iklan politik, juga disediakan program debat dan *talk show* yang bisa diisi oleh para politisi sebagai peluang untuk beriklan tanpa bayar.

Cook mengambil konsep institusi tersebut dalam penelitiannya mengenai media berita. Tiga gagasan penting institusionalisasi media terjawab. *Pertama*, organisasi-organisasi media pada dasarnya memiliki kesamaan nilai dalam aturan dan prosedur rutin yang terartikulasi praktis pada cara kerja kolektif jurnalistik mereka. Dengan kata lain, jurnalis tidak sepenuhnya bebas selama proses pembuatan berita merupakan pekerjaan kolektif organisasi. Rutinitas merupakan bagian krusial bagi setiap jurnalis

dan organisasi berita itu sendiri secara keseluruhan untuk melaporkan berita.

“Aturan dan prosedur yang membentuk institusi dipahami sebagai sesuatu yang memang sewajarnya terjadi. Misalnya, mereka sama-sama menanggung perpanjangan waktu kerja dan perpanjangan ruang gerak, dan secara luas mengenali organisasi sebagai institusi serta memahami dari luar bahwa mereka menjalankan pekerjaan serupa yang memiliki tempat sebagai titik pusat masyarakat dan kebijakan.” (Cook, 1998:71)

Pembuatan berita menurut Cook adalah sebuah proses kolektif yang justru lebih dipengaruhi oleh rutinitas tak terbantahkan dari institusi daripada oleh sikap-sikap individu wartawan.

“Bagaimanapun, kita melihat surat kabar dan majalah berita, serta laporan radio dan televisi yang diakhiri dengan reporter yang mengidentifikasi diri mereka dengan nama, afiliasi, dan lokasi. Namun, seperti yang umumnya disimpulkan oleh para akademisi, pembuatan berita adalah proses kolektif yang justru lebih dipengaruhi oleh rutinitas tak terbantahkan dari pekerjaan jurnalistik sebagai suatu institusi daripada oleh sikap individu jurnalis sendiri.” (Cook, 1998:71)

Cook memberikan contoh, baik redaktur atau reporter di lapangan dari ragam media apa pun akan berbagi nilai yang sama tentang apa yang pantas disebut berita. Atau, mereka tahu di mana berita-berita itu dapat muncul sehingga mereka secara konstan mendapat pasokan bahan mentah berita. Situasi ini berevolusi, tak lekang melawan waktu, dan dikenali di semua organisasi media. Sosiolog dari Jepang Tamotsu Shibutani (Dalam Cook, 1998:74) turut menyebutkan bahwa setiap individu yang berada dalam situasi ambigu yang sama akan cenderung membangun interpretasi makna yang sama dengan menggunakan sumber daya intelektual mereka.

Terlepas fakta bahwa organisasi media itu beragam, terutama dalam hal target audiens, medium teknologi (TV, radio, cetak, dalam jaringan—

daring/*online*), atau perioditas, tetap saja proses pembuatan berita dan konten cenderung sama di antara satu dengan yang lainnya. Cook juga mengkritisi bahwa sebagai seorang individu, jurnalis bertahan dalam proses pembuatan berita karena mereka dipaksa oleh tujuan dan prosedur media sebagai organisasi secara keseluruhan (Cook, 1998:71).

Kita bisa melihat isu-isu terkini yang diangkat beragam media seringkali serupa. Bahkan ada kesan, mereka saling melihat dan mengamati untuk menggali ide berita. Bahkan, untuk memudahkan pola kerja, mereka saling bekerja sama terutama tentang bagaimana mereka mengumpulkan bahan berita. Ujungnya kondisi ini mengarah pada tugas liputan yang sama bagi para jurnalis (Cook, 2012:53). Begitu pula menurut Gaye Tuchman (1973:110), jurnalis mengikuti aturan dan rutinitas yang datang dari perkembangan berita atau yang disebut sebagai “*routinizing the unexpected.*”

Bila ditelusuri lebih jauh, para reporter sebenarnya seringkali menggunakan *angle* yang sudah ada sebelumnya. Reporter sering berakhir dengan pengulangan *angle* dalam berita yang baru. Cook menyebutnya dengan kebaruan tanpa perubahan atau *novelty without change* yang terdapat dalam sebuah rutinitas kerja jurnalistik mereka.

“Reporter berita harian juga mengikuti alur rutinitas, sebab, untuk memulainya, sangat jelas bahwa berita harian sebenarnya adalah pendekatan organisasi yang bukan hanya dari segi kepingin tapi juga produktivitas. Baik penugasan secara umum dan reporter berita harian pergi ke tempat dugaan berita akan terjadi; mereka bergantung pada sejumlah narasumber yang mengetahui jelas peristiwa; dan mereka mengumpulkan

potongan fakta dan informasi menjadi laporan yang koheren dan memuaskan.” (Cook, 1998:73)

Dengan kata lain disimpulkan bahwa jurnalis tidaklah bekerja sendirian dalam proses pembuatan berita dan mereka memandang rutinitas, prosedur serta aturan tersebut sebagai sesuatu yang memang sewajarnya dalam proses pembuatan berita. Cook (1998:76) bahkan turut menambahkan: *“News is an organizational accomplishment first and foremost. Such decisions of newsworthiness are embodied in and inseparable from the daily work routines, which are understood to be “neutral” way to gather news.”*

Kedua, organisasi-organisasi media dalam beberapa praktik langsung mengalami tekanan situasi yang sama. Cook menyebutkan ada “tiga tekanan” yang membuat media bisa saling mendekatkan diri: (i) politik luar (*outside politic*); (ii) ketidakjelasan (*uncertainty*); dan (iii) profesionalisasi.

Politik luar dimaksudkan bahwa media-media tersebut beroperasi pada lingkungan politik yang sama, di mana mereka sama-sama bergantung pada sumber resmi yang sama dan mengambil keuntungan dari subsidi informasi (*press release*, ruang wartawan, dan kemudahan yang lain). Oleh karena itu, tidak heran jika konten berita biasanya terlihat mirip satu sama lain.

“Liputan media berita terhadap sumber resmi adalah untuk kepentingan subsidi informasi, di mana mengakibatkan mereka berada dalam situasi yang sama-sama bergantung pada kekuatan politis serupa. Lebih lanjut reporter akan menuju ke orang-orang tertentu yang memiliki informasi terkait, sehingga konten berita terlihat serupa satu dengan yang lainnya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebijakan publik, apakah berita diperoleh melalui subsidi informasi atau akomodasi pemerintah terhadap media pemberitaan, mengacu pada surat kabar atau media lainnya sebagai subjek kelas regulasi atau subsidi, termasuk juga reporter sebagai sebuah kelompok yang dapat memperoleh akses ke pemerintah.” (Cook, 1998:76)

Sedangkan faktor tekanan “ketidakjelasan”, untuk memahaminya akan sangat berhubungan erat dengan faktor tekanan yang ketiga, profesionalisasi. Ide tentang wartawan sebagai profesi masih dapat diperdebatkan dalam ranah sosiologi profesi. Imbasnya hal ini dapat mengarah pada ketidakjelasan definisi tentang siapa itu wartawan dan mengapa disebut wartawan.

Gagasan mengenai profesionalisasi sebagai tekanan bagi jurnalistik masih berada dalam perdebatan dan belum memiliki definisi jelas mengenai profesi jurnalis. Hal tersebut juga mengarah pada ketidakjelasan mengenai siapa sebenarnya jurnalis dan mengapa mereka harus disebut sebagai suatu profesi. Jurnalistik, merupakan profesi yang masih dipertanyakan, terlebih jika kita membandingkannya dengan profesi seperti pengacara dan dokter, di mana kedua profesi tersebut membutuhkan spesialisasi pendidikan dan sertifikasi resmi dari negara (Cook, 1998:76).

Cook (1998:77) mengatakan “...consisting of a series of rituals that project objectivity, factuality, and other indicators of so-called journalistic ethics allow individual news organizations to control journalistic work for

the organization's own interest.” Dengan kata lain, faktor penekan tersebut lalu mendekatkan mereka pada suatu kesamaan tata kerja dan ritual jurnalistik seperti menjaga objektivitas, faktualitas, dan indikator-indikator lain yang terangkum menjadi etika jurnalisik. Sebagai tambahan, media-media tersebut membangun sebuah gabungan mutual eksplisit tentang bagaimana mereka diperlengkapi untuk mengumpulkan berita, membimbing ke pekerjaan yang sama atau tugas reporter untuk peliputan tertentu.

Keberadaan kode etik profesi yang dikenali sebagai kode etik jurnalistik ini yang sebenarnya dapat menunjukkan media profesional. Kode etik inilah yang kemudian menjadi kesepakatan fundamental yang menuntut organisasi-organisasi media untuk berkeja secara profesional dalam menekankan objektivitas, faktualitas, dan indikator lainnya.

Ketiga, media pemberitaan dipandang oleh jurnalis dan nonjurnalis memiliki peran yang sudah ditakdirkan dalam kehidupan sosial dan politik. Hal tersebut berarti, orang-orang yang berada dalam organisasi berita, entitas politik dan masyarakat melihat media memiliki tugas tertentu dalam menyediakan informasi dari para elite kepada publik atau dalam publik itu sendiri.

Cook (1998:83) menyatakan bahwa media dan pemerintah memiliki posisi yang saling bergantung. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan media untuk mendiseminasikan informasinya, dan di sisi lain media juga

membutuhkan pengakuan pemerintah dalam konsep kebebasan pers dan perlindungan payung hukumnya.

Cook (1998:83) dengan jelas menyatakan: “*Government does and should rely upon the news media to disseminate the news.*” Jurnalis merangkul bagian informasi pemerintah dan membantu mendiseminasikannya kepada publik. Namun, media dalam hal ini juga dapat menjalani satu atau dua peran secara tumpang tindih. Media dapat berperan dalam menyebarkan informasi secara netral apa adanya (*neutral disseminator*) atau justru berperan dalam membantu menginterpretasikan kebijakan, masalah, dan klaim pemerintah.

Ketiga konsep institusionalisasi media telah digunakan Cook untuk membenarkan media sebagai sebuah institusi. Lebih jauh, Cook mengungkapkan bahwa selain sebagai institusi politik, media juga merupakan aktor politik. Cook berargumen dengan menunjukkan kecenderungan studi yang selama ini menyatakan bahwa peran politik media itu terletak pada upaya meluaskan jangkauan elite politik, berfokus dalam hal menguatkan pihak otoritas resmi sebagai narasumber dan kurang memedulikan alokasi nilai mereka.

“Media pemberitaan paling tidak sebagian independen dari sumber mereka dalam menghasilkan konten berita. Selanjutnya, mereka mampu untuk mempengaruhi siapa narasumber yang otoritatif, apa nilai-nilai politis yang ada, dan alokasi seperti apa. Media pemberitaan memiliki takdir yang serupa dengan ketiga cabar konstitusi yang menjadi sebagian independen dan sebagian dependen terhadap institusi lainnya dalam upaya menyelesaikan tugas mereka masing-masing.” (Cook, 1998:86)

Menurut Cook, pandangan tersebut tidak sesederhana itu karena media pemberitaan sebagian independen dari narasumbernya dalam memproduksi isi berita. Media pemberitaan mungkin dapat menentukan siapa narasumber yang otoritatif, apa nilai-nilai politis yang ada, dan alokasi seperti apa yang layak diberikan.

Lebih jelasnya, pers disebut sebagai aktor politik karena mereka memiliki hak dalam memutuskan apa *lead* berita, kutipan siapa yang akan digunakan, dan penyusunan kalimat seperti apa (Cook, 1998:72). Cook (1998:87) juga menyebutkan bahwa pers dapat menentukan siapa yang seharusnya berbicara atas isu apa dan di bawah situasi seperti apa. Cook menyebut pembuatan berita sebagai *crafting a product that journalists felt a strong sense of autonomy in their work*.

2.2.4 Tiga Peran Politik Pers

Mengacu pada penjelasan Cook mengenai pers sebagai aktor dan institusi politik, McCargo (2003:3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, media mempunyai tiga peran politik. Ketiga peran tersebut adalah:

1. Agen stabilitas (*agent of stability*)

Peran media sebagai agen stabilitas memiliki kewajiban dalam tugas memelihara ketertiban sosial dan politik. Fungsi tersebut

secara umum berhubungan erat dengan istilah “jurnalisme pembangunan”. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi ini, media terlingkupi dengan tugas membantu pemerintah dalam proses *nation building* dalam konteks jurnalisme pembangunan.

2. Agen pengawasan (*agent of restraint*)

Peran media sebagai agen pengawasan adalah melalui pemantauan setiap hari terhadap ketertiban politik dalam kepentingan pemerintah, melakukan *checks and balances*. Pada fungsi kedua ini, media bertindak selaku “anjing penjaga” (*watchdog*) yang mengawasi keseharian dari struktur politik. Pemantauan ini dapat meliputi editorial kritik mengenai kebijakan pemerintah hingga skala laporan padat investigasi mengenai kasus korupsi.

3. Agen perubahan (*agent of change*)

Media dalam perannya sebagai agen perubahan memiliki fungsi layaknya petugas pemadam kebakaran (*fire fighting*). Dengan kata lain, media turut berkontribusi untuk membantu membentuk perubahan politik selama situasi krisis. Dalam kasus ekstrim, peran tersebut berpotensi untuk menjatuhkan rezim pemerintahan.

Ketiga peran tersebut adalah fungsi yang dapat menggambarkan media sebagai institusi politik. Media-media tersebut secara luas merupakan

setara dengan tiga deskripsi adjektif peran alternatif media: konservatif, progresif, dan transformatif (McCargo, 2003:4).

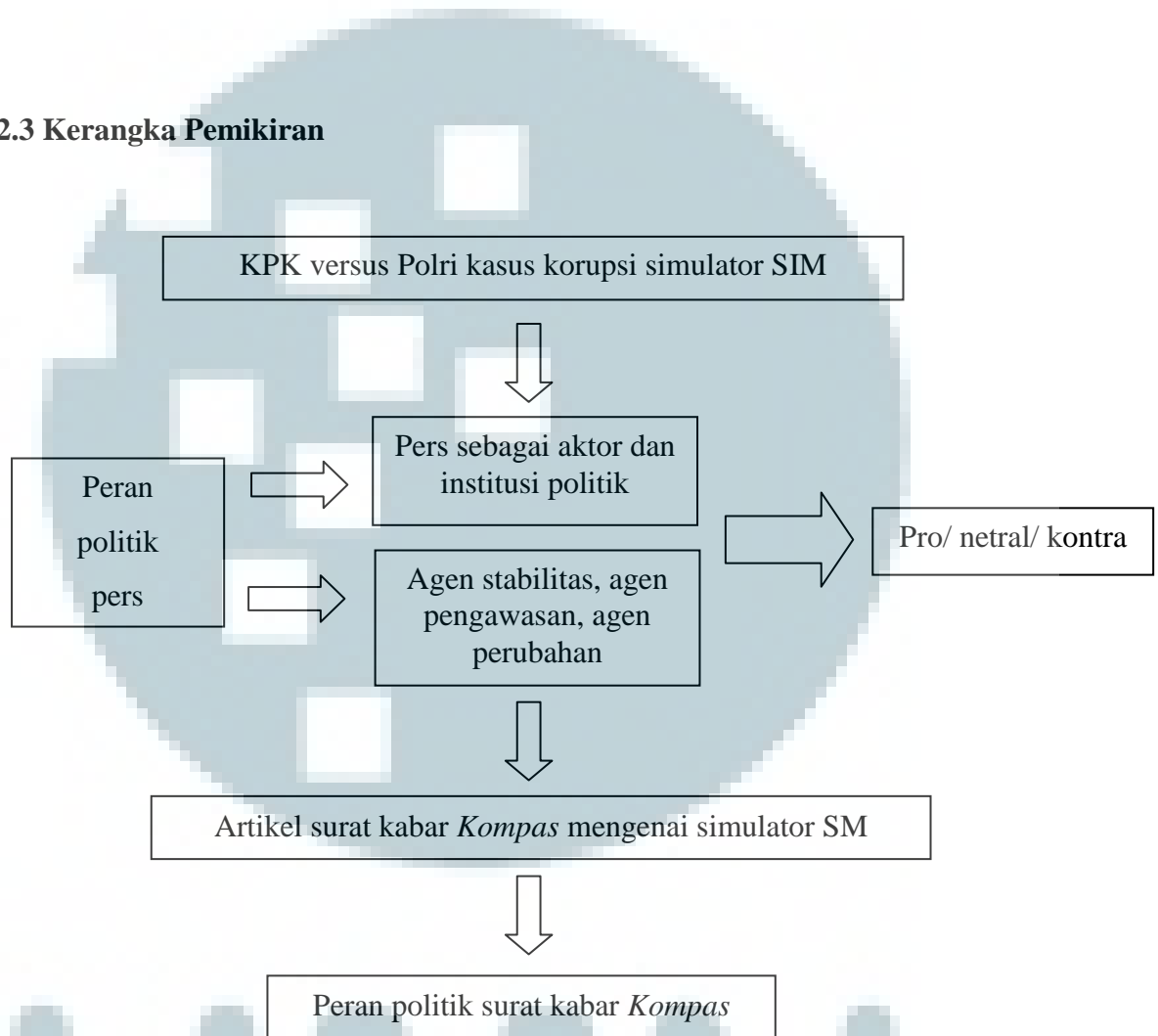
Peran tersebut mencoba mengasumsikan bahwa pers menampilkan peran politik tertentu dalam masyarakat di suatu masa: sebagai agen stabilitas pada masa rezim otoritarian (seperti Burma sekarang ini); agen pengawasan dalam demokrasi liberal (seperti Jepang pada 1970-an); dan agen perubahan dalam masyarakat saat terjadinya transisi politik (seperti Thailand pada 1992). Namun, dalam praktiknya, media bersifat polivalen, dan dapat saja mengadopsi berbagai model peran secara simultan (McCargo, 2003:4).

Bagian-bagian dari pers yang berbeda, sangat mungkin untuk memberi dukungan, memarahi, atau mencela para pemegang kekuasaan pada saat yang bersamaan. Suatu publikasi tunggal pun dapat menjadi polivalen, misalnya kolumnis dan jurnalis yang berbeda dapat menerapkan bentuk agen politik yang berbeda, halaman depan yang memuat kritisi mengindikasikan bahwa publikasi ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemegang kekuasaan tertentu, sedangkan bagian editorial menampakkan dukungan halus mereka, serta kolumnis yang agresif meminta pengunduran diri pihak penguasa.

Dalam mengevaluasi sikap dari peran politik yang ditampilkan oleh pers dalam situasi tertentu, menurut McCargo, diperlukan dua kecermatan mendalam mengenai dua faktor berikut: *pertama*, kepemilikan dan kontrol

publikasi; dan *kedua*, hubungan antara pemilik perusahaan media, jurnalis, dan pemegang kekuasaan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Surat kabar *Kompas* memiliki peran politik sebagai agen stabilitas (*agent of stability*) apabila *Kompas* mempublikasikan artikel yang bersifat netral atau disebut tidak menempatkan sikap, tetapi lebih berperan sebagai pers pembangunan. Agen stabilitas di sini berarti *Kompas* tidak menjalankan

fungsinya sebagai *watchdog* yang berperan sebagai pengkritik pemerintah apabila terdapat penyimpangan (*misdoing*) dalam pemerintahan.

Sedangkan sebagai agen pengawasan (*agent of restraint*), surat kabar *Kompas* mempublikasikan artikel yang bersifat mengkritisi pemerintah karena adanya penyimpangan (*misdoing*) dalam pemerintahan. Artinya, jika *Kompas* berperan sebagai agen pengawasan dalam kasus cicak versus buaya jilid dua ini, surat kabar *Kompas* akan bersikap kritis terhadap lembaga Polri karena diduga terdapat praktik kotor korupsi. Sesuai yang dikatakan McCargo (2003:3) tentang peran agen pengawasan yang melakukan *check and balancing* dan mengkritisi pemerintah: “*This monitoring could range from critical editorializing about government policies to full-scale investigative reporting about high-level corruption.*”

Peran politik terakhir adalah agen perubahan (*agent of change*). Surat kabar *Kompas* berperan sebagai agen perubahan apabila artikel berfungsi dalam membentuk perubahan politik selama masa krisis. Namun, dalam kasus korupsi simulator SIM Korlantas, *Kompas* diperkirakan tidak mengambil peran sebagai agen perubahan karena tidak adanya masa krisis politik yang dapat mengakibatkan transisi politik ke arah penumbangan rezim. Surat kabar *Kompas* mungkin dapat berperan sebagai agen perubahan apabila terdapat kasus korupsi simulator SIM Korlantas ini dapat berimbas pada penumbangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.